

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
DALAM PENYELENGGARAAN DAN PERENCANAAN PELABUHAN
PENYEBERANGAN RO-RO DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2015**

Oleh :

Risky Perdana

Email : Riskyperdana20@yahoo.co.id

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63272

Abstract

Ro-ro ferry ports in Bengkalis is a port that has prospects for development and the considerable potential in terms of geographical aspect and the opportunity to support the growth of the industry and the region's economy. The problems of this research are the Role of Department of Transportation Sector Land Transport Implementation and Planning in Ro-ro port in Bengkalis and the Patterns Transportation Agency Relationships with Private Sector Land Transport Implementation and Planning in Ro-ro port in Bengkalis. This research aims to knows the role of the Department of Transportation Sector Land Transport and the Pattern of Private Relationship with Implementation and Planning in Ro-ro port in Bengkalis.

The method's of this research is a qualitative method with the type of data used primary data and secondary data, data sources and documents obtained through informants research place. Data were collected by interview, observation and documentation, and then analyzed in a descriptive way to provide an overview of the research results.

The results of this research are the role of the Department of Transportation Division of Land Transport in the administration and planning of ro-ro port in Bengkalis has not been able to provide optimum services because facilities such as docks and parking lots yet to be finalized, so that problems such as congestion, reliability of schedules and comfort aspects is still perceived by the user / passenger ship.

Keywords: Strategy, Implementation, Planning

PENDAHULUAN

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan professional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau.

Kabupaten Bengkalis tepatnya di Pulau Bengkalis Provinsi Riau yang mana masyarakat pada umumnya baik yang berasal dari Kabupaten itu sendiri maupun mereka yang berasal dari luar Kabupaten Bengkalis yang berkepentingan untuk berpergian keluar dari Pulau Bengkalis ataupun yang ingin ke Pulau Bengkalis, maka mereka memiliki dua pilihan alat transportasi yaitu kapal-kapal kargo kelas menengah dan kapal ferry cepat berjenis speedboot yang berkapasitas angkut sampai 300 penumpang, merupakan transportasi laut dan kapal ferry penyeberangan ro-ro yang merupakan transportasi darat.

Mayoritas masyarakat pada umumnya pada saat sekarang lebih banyak menggunakan fasilitas alat transportasi umum kapal ferry penyeberangan ro-ro dalam kegiatan mereka yang mana kapal ferry ini menyeberang dan menghubungkan antara Pulau Bengkalis dan Sungai Pakning, Riau Daratan, sekaligus untuk membuka akses keseluruh kota-kota kecil dan besar di Pulau Sumatera. Karena, masyarakat lebih banyak memakai kendaraan pribadi seperti motor dan mobil dalam melakukan kegiatan mereka sehingga kapal ferry penyeberangan ro-ro yang lebih sering digunakan.

Problem umum yang berkembang adalah yang berkaitan dengan kondisi keterbatasan jumlah dan kapasitas dermaga, masalah overloading, rendahnya jaminan keselamatan (kualitas pemeriksaan fasilitas keselamatan rendah), keterandalan jadwal serta aspek kenyamanan, keterbatasan jumlah dan/atau kepemilikan sarana angkutan.

Berdasarkan hasil data pencatatan yang dilakukan oleh pihak administrator pelabuhan penyeberangan ro-ro Bengkalis, terlihat jumlah pengguna penyeberangan fluktuatif namun secara tahunan (*annual data report*) terjadi pertumbuhan yang nyata. Bahkan dalam bulan tertentu (ramadhan-syawal) dan tahun baru terjadi lonjakan drastis yang mengakibatkan daya tampung pelabuhan penyeberangan mengalami “*overcapacity*”, sehingga terjadi kemacetan dan antrian panjang. Dalam situasi dan kondisi ini pihak administrator pelabuhan penyeberangan tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik.

Berdasarkan permasalahan diatas Dinas Perhubungan memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu menyelenggarakan kegiatan di Bidang Perhubungan Darat yang terdapat di Bab IV Pasal 8 ayat (1) dan (2) Bagian Ketiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang Perhubungan Darat yang meliputi fasilitas perhubungan darat, lalu lintas dan angkutan perhubungan darat serta keselamatan dan pengawasan perhubungan darat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diatas, bidang Perhubungan Darat dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis bidang Perhubungan Darat sesuai kebijakan Kepala Daerah;
- b. Penetapan lokasi terminal, pengelolaan pemeliharaan fisik, ketertiban dan keamanan terminal;
- c. Penetapan lokasi pengolahan parkir, lokasi tempat-tempat penyeberangan jalan, serta penempatan lokasi pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum diwilayah Kabupaten;
- d. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas;
- e. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Daerah;
- f. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda jalan dijalan Kabupaten;
- g. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten tertentu dan jalan Provinsi yang berada di Ibukota Kabupaten sesuai dengan kewenangan Daerah;
- h. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Menyikapi tugas dan fungsi (Tupoksi) dari Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat maka kenyataan yang ada masih jauh dari harapan, karena seperti yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan yaitu Bpk. H. Ja'afar Arief, S.Sos mengatakan bahwa Bengkulu masih minim pegawai teknis perhubungan sehingga berdampak kepada pelaksanaan tupoksi yang belum maksimal.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu mengakui, saat ini masih minim pegawai teknis di bidang perhubungan dan hanya tersedia petugas dari disiplin ilmu di luar perhubungan, sehingga untuk

memaksimal tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dishub Kominfo masih menjadi kendala. "Harus diakui, Dishub ini tidak ada pegawai atau pejabat yang berlatar belakang disiplin ilmu perhubungan." ujar Kepala Dishub Kominfo Kabupaten Bengkulu Ja'afar Arief disela-sela kegiatan pisah sambut sejumlah Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) di jajaran Dishub Kominfo.

Dari pernyataan oleh Kepala Dinas Perhubungan tersebut yang mungkin mencakup semua Bidang Perhubungan dan salah satu alasan mengapa tupoksi yang dijalankan oleh Dishub belum maksimal, jelas membutuhkan evaluasi dan pembenahan disetiap bidang perhubungan, tidak terlebih lagi disektor Perhubungan Darat yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelabuhan ro-ro, yang mana permasalahan ini harus lebih diutamakan baik itu disegi pembangunan atau peningkatan fasilitas. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bengkulu adalah sebuah pulau yang dikelilingi laut dan pasti penggunaan dan kebutuhan akan fasilitas umum yaitu kapal ferry penyeberangan ro-ro lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan mereka.

Dari beberapa persoalan permasalahan diatas, maka dalam hal ini perlu penulis menganalisis bagaimana penyelenggaraan dan perencanaan pelabuhan penyeberangan ro-ro di Kabupaten Bengkulu oleh Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat dan pihak-pihak yang terkait dalam mengelola persoalan-persoalan pelabuhan di Kabupaten Bengkulu khususnya di pelabuhan penyeberangan ro-ro. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian "***Peran Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat dalam Penyelenggaraan dan Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro di Kabupaten Bengkulu Tahun 2015***".

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Peran

Peranan adalah dari kata dasar “peran” yang ditambahkan akhiran “an”. Peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peran adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Levisnson dalam buku karangan Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono Peran adalah perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut W.A Gerungan dalam persepektif ilmu psikologi sosial, peranan didefinisikan dengan suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki suatu status didalam kelompok tertentu.

Ketika kita mencari cara untuk mengorganisasikan informasi tentang orang lain, adalah penting untuk mengetahui peran sosial, bahkan mungkin lebih penting ketimbang pengetahuan tentang sifat orang lain. Ada banyak cara untuk menjadi sosok ekstrover (yakni menjadi komedian, pemimpin politik, atau tukang onar) namun hanya ada relatif sedikit cara untuk menjalankan peran yang konkret (seperti menjadi politisi). Konsekuensinya, peran adalah informatif, meringkas banyak informasi untuk berbagai macam situasi. Peran juga lebih menonjol ketimbang sifat, menimbulkan lebih banyak asosiasi.

2. Konsep Perencanaan

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak mengurus tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya.

Definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengertian lain menyebutkan juga perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam *Kamus Management* karangan Moekijat (1980) menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. Kemungkinan besar

perumusan ini dikutip dari berbagai buku teks manajemen. Empat di antaranya dikutip berikut ini:

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang ingin dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan.
3. Perencanaan merupakan penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program.

Menurut Conyers & Hills (1994) dalam Arsyad (1999: 19), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

3. Manajemen Strategi Sektor Publik

Esensi manajemen publik adalah mengelola aset untuk mencapai hasil/tujuan Negara pada umumnya dan tujuan organisasi pada khususnya. Proses pencapaian tujuan adalah merupakan proses yang berat dan berliku mengingat

pada satu sisi pasti selalu ada hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan, pada sisi lain organisasi memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena adanya hambatan dan keterbatasan itulah, maka proses pencapaian tujuan memerlukan strategi.

Manajemen strategis (*strategic management*) adalah konsep yang dikembangkan ahli manajemen dengan mengadopsi teknik pertempuran militer. “*Strategy means winning the war*” (Kaufman & Wallack, 1980: 12). Secara literal, strategi berasal dari bahasa Yunani *stratus* = tentara (*army*), dan *strategos* = keperwiraan (*generalship*). Sedangkan secara substansial strategi pada awalnya adalah merupakan konsep dan sikap mental untuk membuat seorang manajer berpikir-bertindak seperti jenderal komandan perang, dan kemudian konsep ini berkembang untuk membuat manajer membuat rencana tindak yang terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam sektor publik, konsep manajemen strategis dikembangkan seiring dengan perubahan paradigma birokrasi dari model tradisional Weberian ke model-model baru seperti *new public management* (Hughes, 1998: 149). Model birokrasi tradisional seiring dikritik terlalu berorientasi ke dalam (*inward focus*) dan ber-perspektif jangka pendek. Oleh karenanya, model *new public management* menawarkan ide untuk mengelola organisasi public yang berorientasi ke luar (mengenali lingkungan organisasi-*outward looking*) dan berspektif jangka panjang. Pemikiran manajemen strategis meletakkan organisasi dalam lingkungan eksternal; bertujuan untuk memperjelas maksud dan tujuan; dan berusaha untuk mengubah aktivitas organisasi dari rutinitas administratif menuju kepada kegiatan yang berorientasi pada aspek jangka panjang secara lebih sistematis. Hal ini perlu dilakukan mengingat

rutinitas administratif dinilai tidak akan mampu menjawab perkembangan sosial yang bergerak cepat pada masa sekarang ini. Oleh karenanya strategi diperlukan agar organisasi pada khususnya dan Negara pada umumnya dapat menghadapi ketidakpastian masa depan dengan lebih terkontrol, sebagaimana dikemukakan oleh Nutt dan Backoff (1992: 58): “...*strategy is a crucial concern: positioning the organization to face an increasingly uncertain future.*”

Akan tetapi yang harus diingat, manajemen strategis adalah konsep yang dikembangkan dari sektor swasta, dan karenanya tidak selalu sejalan dengan kondisi yang ada pada sektor publik, sehingga adalah tidak mungkin mengadopsi model swasta secara *taken for granted*. Ada banyak masalah dan halangan untuk mengaplikasikan konsep manajemen strategis ke dalam sektor publik, mulai dari konstitusional, perundang-undangan, peraturan pemerintah, adanya kepentingan politik, keterbatasan sistem anggaran, dan pola hubungan antar *stakeholders* yang khas dalam sektor ini.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti

memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri.

Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang terletak di daerah Provinsi Riau. Alasan mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan penulis memandang masalah tersebut sangat menarik mengingat pertimbangan bahwa pelabuhan penyeberangan ro-ro Kabupaten Bengkalis memiliki prospek yang sangat tinggi karena setiap tahunnya jumlah penumpang atau pengguna jasa layanan ini meningkat. Tetapi, tidak diikuti dengan pelayanan yang maksimal dari pemerintah daerah dan dinas terkait.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. *Indepth Interview*, wawancara yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang melakukan wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pernyataan tersebut. Wawancara yang dilakukan kepada pihak Kantor Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat serta UPTD (unit pelaksana teknis dinas) selaku yang mengelola pelabuhan penyeberangan ro-ro Kabupaten Bengkalis.
- b. Observasi Partisipatif, observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi yaitu sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu yang maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. (Emzir, 2012: 36)

c. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. (Widodo,2012: 61)

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari penyelenggaraan dan perencanaan pelabuhan penyeberangan ro-ro yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisa deskriptif analitis dengan menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan lapangan sehingga diperoleh analisa seobjektif mungkin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan penyeberangan ro-ro di Kabupaten Bengkalis memiliki prospek perkembangan dan potensi yang cukup besar di tinjau dari aspek geografisnya dan peluang untuk mendukung pertumbuhan industri dan perekonomian wilayah Kabupaten Bengkalis.

Dalam perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan, serta penyelenggaraan pelabuhan merupakan hal yang sangat penting yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan selaku instansi yang berwenang terhadap segala kegiatan yang ada di pelabuhan penyeberangan ro-ro Kabupaten Bengkalis.

Pelabuhan penyeberangan ro-ro merupakan akses yang sangat vital bagi pengguna atau penumpang dengan berbagai profesi dan kepentingan yang mengharuskan mereka menggunakan transportasi ini. Artinya, pelabuhan ro-ro tidak hanya sekedar untuk menaik-turunkan penumpang, tetapi banyak kebutuhan seperti bahan pokok, bbm, dan bahan bangunan juga menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan ro-ro yang diangkut oleh kapal-kapal ferry. Oleh karena itu, peran pemerintah dan dinas terkait serta kerjasama dengan swasta merupakan kunci, agar perencanaan hingga penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan juga dapat memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna/penumpang pelabuhan ro-ro di Kabupaten Bengkalis.

Perlu disadari bahwa pengertian “pengelolaan pelabuhan” sesungguhnya bukan dalam arti sempit sebagai pengelolaan dermaga dan infrastruktur fisik pelabuhan lainnya, melainkan juga menyangkut keselamatan lalu lintas pelayaran, sistem navigasi dan persandian, perizinan bagi kapal-kapal yang akan berlabuh atau berlayar, administrasi bongkar muat, dan sebagainya. Kewenangan teknis seperti itu sangat mensyaratkan kemampuan yang handal dari SDM dan perangkat sistem kediklatan pendukungnya.

Munculnya wacana pembangunan/pengembangan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bengkalis dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Peningkatan arus transportasi
Perkembangan ekonomi masyarakat Bengkalis jelas membawa dampak pertumbuhan arus transportasi barang dan mobilisasi penduduk bersama kendaraan yang dimilikinya. Pembangunan yang makin meningkat

bersamaan dengan pengelolaan otonomi daerah yang makin tertata, jelas telah mengakibatkan moda transportasi darat ke laut melalui ro-ro meningkat.

2. Bengkalis hanya memiliki 1 (satu) pelabuhan penyeberangan ro-ro Pelabuhan penyeberangan yang ada di Bengkalis menghubungkan dengan wilayah Riau (Pulau Sumatera) hanya satu yakni pelabuhan penyeberangan ro-ro di Desa Air Putih. Kondisi ini tidak hanya ideal bagi kelancaran arus transportasi barang dan mobilisasi masyarakat. Jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat difungsikannya pelabuhan penyeberangan, maka sudah pasti arus barang terhenti dan perekonomian lumpuh.
3. Umur konstruksi ro-ro yang ada sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan informasi dan pengamatan (observasi) di lapangan, terlihat bahwa keberadaan pelabuhan penyeberangan Bengkalis yang telah berumur lebih dari 10 tahun, sudah saatnya perlu diadakan peninjauan ulang terhadap aspek teknis konstruksi dermaganya. Terhadap bangunan-bangunan laut yang dinamis dioperasikan, perlu diadakan monitoring berkala terhadap kekuatan struktur untuk menghindari penurunan kualitas bahan.
4. Antisipasi kemajuan ekonomi terhadap kebutuhan ro-ro Berdasarkan catatan dalam rencana induk Kepelabuhanan Nasional, pada tahun 2002, telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 tahun 2002, tentang tatanan Kepelabuhanan Nasional, bahwa Bengkalis merupakan kota pelabuhan yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan penyeberangan, tidak hanya dengan Pulau Sumatera, namun juga

dengan pulau-pulau lain di Kepulauan Riau, seperti Mengkapan, Tanjung Balai, dan Selat Panjang. Penetapan ini, mempunyai konsekuensi bahwa Bengkalis harus sudah mulai mengantisipasi dan mempersiapkan diri menjadikan pelabuhan penyeberangannya lebih representatif dan futuristik.

Pembangunan pelabuhan penyeberangan Bengkalis yang memanfaatkan lahan (dataran maupun lautan) yang cukup luas, berada di pesisir pantai serta berdekatan dengan lingkungan pemukiman pasti memiliki dampak yang luas bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya sekitarnya. Karena itu kajian terhadap aspek lingkungan secara mendalam dan khusus sangat diperlukan.

Berdasarkan jenis kegiatan yang direncanakan kegiatan pematangan lahan reklamasi, pembangunan sarana/prasarana, penimbunan material, pengangkutan dan pemutusan hubungan tenaga kerja merupakan kegiatan utama yang diperkirakan berpotensi akan menimbulkan dampak penting negatif terhadap perubahan fisik (*factor abiotis*), biologi (*factor biotis*), sosial ekonomi dan budaya di lokasi kegiatan. Sedangkan rencana penerimaan tenaga, pembangunan fasilitas sosial dan reklamasi/rehabilitasi lahan diperkirakan akan menimbulkan dampak penting positif terhadap beberapa perubahan lingkungan disekitar lokasi pembangunan.

Pemantauan dampak penting dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh positif maupun pengaruh negatif dari rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan Bengkalis bagi lingkungan fisik dan masyarakat Kabupaten Bengkalis pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Bengkalis pada khususnya.

Pada dampak negatif penting maupun dampak positif penting evaluasi dampaknya dinilai secara bertahap sesuai dengan tahapan proyek, yaitu Tahap Pra-Konstruksi, Tahap Konstruksi dan Tahap Operasional. Aspek yang ditinjau adalah aspek sosial budaya, ekonomi, fisik dan biologi.

Tahapan penilaian kelayakan pembangunan prasarana transportasi didasarkan pada penilaian akan kriteria atau orientasi kebutuhan masyarakat dan pengguna, sehingga dalam proses tersebut berbagai pertimbangan akan kinerja operasional prasarana sejenis yang sudah ada atau beroperasi dalam wilayah perencanaan serta kontribusinya bagi pertumbuhan (terutama ekonomi) wilayah serta termasuk pula tingkatan interaksi aktivitas (ruang usaha) dengan wilayah-wilayah dilokasi pembangunan prasarana tersebut nantinya akan mudah dikembangkan sesuai tuntutan aktivitas serta dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama, dan pada gilirannya akan mempercepat proses pertumbuhan kawasan tersebut.

Dengan dasar pemikiran demikian, isu umum yang harus dijawab adalah yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan/pertumbuhan ekonomi kawasan, serta aspek aksesibilitas terhadap wilayah pengaruhnya serta aspek keterpaduan intra dan antar moda transportasi perhubungannya, karena akan berdampak pada peningkatan aktivitas penumpang dan barang.

Pembangunan infrastruktur perhubungan saat ini bersifat "*Slow Yelding*" yaitu memakan waktu yang agak lama sebelum investasi yang bersangkutan membuahkan hasil, pengembalian investasi tersebut sangat rendah sedangkan investasi yang ditanamkan sangat besar, tetapi untuk sebagian pemborosan bersumber pada kelemahan

teknis dalam perencanaan, penyelenggaraan dan perawatan proyek-proyek investasi. Dengan kata lain, untuk layanan umum (milik pemerintah) ini aspek finansial benefit dinomerduakan.

Ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalkan dana atau anggaran untuk menyelenggarakan pelabuhan dalam artian yaitu menyediakan kapal pribadi "milik pemda" untuk kebutuhan pelabuhan dikarenakan pemerintah tidak boleh menjadikan itu sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan dan sebaliknya pemerintah mesti menyediakan jasa transportasi dan melayani masyarakat, oleh karena itu langkah untuk menjalin suatu kerja sama dengan pihak swasta adalah hal yang tepat agar pelabuhan penyeberangan ro-ro tetap bisa menjadi alat transportasi yang memudahkan segala kepentingan pengguna atau masyarakat walaupun masih terdapat banyak kekurangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peran Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat dalam penyelenggaraan dan perencanaan pelabuhan penyeberangan ro-ro Kabupaten Bengkalis adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan. Secara garis besar, program pengembangan pelabuhan penyeberangan Bengkalis adalah berdasarkan Renstra (rencana strategis) yang dilakukan secara bertahap.
2. Hubungan mitra kerja dengan perusahaan terjalin setelah pihak Dinas Perhubungan menawarkan kepada Perusahaan Kapal. Dalam kerjasama ini pihak perusahaan hanya sebagai penyedia kapal dan keuntungan yang mereka peroleh adalah dari karcis/tiket dan jasa labuh yang bergantung pada jumlah penumpang.

SARAN

1. Peran Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat dalam penyelenggaraan dan perencanaan pelabuhan ro-ro harus lebih di tingkatkan lagi seperti menyediakan fasilitas dan kebutuhan pelabuhan agar proses penyelenggaraan pelabuhan bisa lebih optimal.
2. Kebersihan atau kenyamanan di dalam kapal harus ditekankan oleh pihak Dishub atau UPTD kepada perusahaan kapal walaupun bukan kewenangan petugas Dishub.
3. Petugas Dishub harus lebih sering memantau segala kegiatan yang ada dipelabuhan karena sering terjadi pelanggaran seperti meloloskan pengguna/penumpang kapal yang tidak diperoleh, serta memberikan

tindakan tegas apabila terjadi hal tersebut.

4. Jaminan keselamatan lebih ditingkatkan lagi karena selama ini kualitas pemeriksaan keselamatan rendah dan banyak mengakibatkan terjadinya insiden atau kecelakaan.
5. Semua aspek yang terkait dalam pengelolaan pelabuhan ro-ro ini bisa bekerjasama agar penyelenggaraan/pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan professional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Emzir. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Gerungan. 1998. *Psikologi Sosial*. Bandung : PT. Eresco

M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Baru

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintah Dan Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Shelley E. Taylor, Lettia Anne Peplau, David O. Sears. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana. Edisi Kedua Belas

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika aditama

Tarigan, Robinson. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Triatmodjo, Bambang. 2010. *Perencanaan Pelabuhan*, Yogyakarta : Beta

Skripsi

Yazid. 2009. *Peran Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Pelabuhan Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten*

Meranti. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jurnal

Jori George Kherel Kastanya L. F. Kereh, M. R. E. Manoppo, T. K. Sendow . 2011. *Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Laut Serui di Kota Serui Papua*. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sam Ratulangi

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2005 Tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis*

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2008 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Bengkalis*

Bahan Bacaan Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (*Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2015*)

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (*Perencanaan Review Master Plan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011*)

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, *Sejarah Singkat Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Bengkalis*

Riau Terkini, 16 April 2014, Rabu, Pukul 16:17 wib

Internet

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

http://dishubkominfo.bengkaliskab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=243. Diakses pada tanggal 23 November 2015